

~~Lowongan
kerja~~

19 JUTA
LAPANGAN
PEKERJAAN

Happy
Birthday

Metodologi Statistik

REPUBLIK OLIGARKI

KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA 2026

Media Wahyudi Askar . Galau D Muhammad . Bhima Yudhistira
Isnawati Hidayah . Bakhrul Fikri . Aulia Lianasari . Jaya Darmawan

Metodologi Statistik

Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Publikasi

April 2026

Penerbit

Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Jakarta, Indonesia

Alamat Surat Elektronik

admin@celios.co.id

Situs Web

www.celios.co.id

Hak Cipta

©2026 CELIOS

CELIOS memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id.



Kekayaan 50 orang
terkaya di Indonesia
setara dengan
kekayaan 55 juta
orang Indonesia.

1

Ketimpangan Ekstrem: 50 Superkaya vs Mayoritas rakyat

1.1 Kekayaan 50 Orang Terkaya Setara dengan 55 Juta Masyarakat Indonesia

Berdasarkan data Forbes (2026), Akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia diperkirakan sebesar \$275,54 atau senilai Rp 4.651 triliun. Konversi berbasis kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) per 10 Maret 2026 dengan penyetaran 1 USD senilai Rp16.879. Sementara Median kekayaan yang digunakan dalam kalkulasi merujuk pada data Global Wealth Report (GWR) 2023 yang diterbitkan oleh UBS/Credit Suisse. Estimasi median kekayaan orang dewasa di Indonesia mencapai \$4.819 pada 2022. Berdasarkan tren kenaikan median kekayaan sepanjang 2019 hingga 2022, median kekayaan penduduk pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp84.352.595 per orang dewasa. Pendekatan median ini diambil karena lebih mencerminkan kondisi mayoritas penduduk dengan tingkat ketimpangan ekstrem. Oleh karenanya ditemukan bahwa kekayaan 50 superkaya tersebut setara dengan kekayaan milik 52,38 juta masyarakat Indonesia. Matriks kalkulasinya sebagai berikut

$$\frac{\text{Total Kekayaan 50 Orang Terkaya}}{\text{Median Kekayaan Dewasa}} = \frac{4.641.000.000.000.000}{84.352.595} = 55.136.618$$

1.2 Tanpa Perubahan Struktur Ekonomi dan Politik, Kekayaan 50 Orang Terkaya Diproyeksikan Setara dengan 111 Juta Penduduk Indonesia pada 2050

Proyeksi ini dihitung dengan membandingkan total kekayaan 50 orang terkaya pada 2050 yang diestimasi sebesar USD670 miliar atau setara Rp11.323 triliun berdasarkan tren data Forbes. Sementara median kekayaan penduduk Indonesia diproyeksikan mengikuti tren Global Wealth Report sebesar USD6.021 atau setara Rp101.635.103 per orang. Kalkulasi Total kekayaan 50 superkaya tersebut menghasilkan ekuivalensi dengan kekayaan 111.408.754 orang dewasa di Indonesia. Asumsi menggunakan Kurs JISDOR per 10 Maret 2026 sehingga USD 1 terkonversi sebesar Rp16.879.

1.3 Total Harta 50 Orang Superkaya Lebih Besar dari APBN Tahun 2026

Kalkulasi ini membandingkan agregat antara total kekayaan 50 individu terkaya sebesar Rp4.651 triliun berdasarkan data Forbes (2026) dengan total belanja negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 sebesar Rp3.786,5 triliun sehingga menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan privat pada kelompok sangat terbatas telah melampaui kapasitas fiskal tahunan negara.

1.4 Sebanyak 0,000000174% Populasi Menguasai Kekayaan Setara 18,6% Rakyat Indonesia

Metodologi ini menghitung proporsi demografis dengan membandingkan 50 individu terhadap total populasi Indonesia sebesar 287.198.400 berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 6 Februari 2026. Hasilnya menunjukkan bahwa 50 orang tersebut hanya merepresentasikan 0,000000174% dari total populasi. Selanjutnya total kekayaan 50 orang terkaya dibandingkan dengan PDB atas dasar harga berlaku Kuartal IV 2025 sebesar Rp25.024 triliun. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kekayaan tersebut setara dengan 18,6% atau hampir seperlima kapasitas ekonomi nasional.

1.5 Kekayaan Oligarki Naik Rp13 Miliar per Hari sementara Upah Pekerja hanya Naik Rp2 Ribu per Hari

Berdasarkan data Forbes, kenaikan rata-rata kekayaan 50 superkaya pada 2025-2026 mencapai Rp4,92 triliun per tahun (Rp4.921.771.240.600). Nilai ini kemudian dikonversi ke satuan waktu yang lebih kecil sehingga setara dengan Rp410,15 miliar (Rp410.147.603.383) per bulan , Rp13,48 miliar (Rp13.484.304.769) per hari , Rp561,85 juta (Rp561.846.032) per jam , Rp9,36 juta (Rp9.364.101) per menit , dan Rp156 ribu per detik. Asumsi menggunakan Kurs JISDOR per 10 Maret 2026 sehingga USD 1 terkonversi sebesar Rp16.879. Sementara itu, kenaikan upah rata-rata pekerja pada 2024-2025 berdasarkan Sakernas Agustus (2025) hanya sebesar Rp760 ribu (Rp760.728). Nilai ini kemudian dikonversi ke satuan waktu yang lebih kecil sehingga setara dengan Rp63 ribu (Rp63.394) per bulan, Rp2.113 per hari, Rp88 per jam, Rp1,47 per menit, dan sekitar Rp0,024 per detik.

1.6 57 Jet Pribadi Menghasilkan 46.170 Ton CO₂e per Tahun, Setara Emisi 7.825 Mobil dan 51.993 Motor



1.7 Kekayaan 50 Superkaya Setara 1,4 Kali PDRB Gabungan Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan Sulawesi

Kalkulasi ini membandingkan agregat antara total kekayaan 50 individu terkaya sebesar Rp4.651 triliun berdasarkan data Forbes (2026) dengan total belanja negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 sebesar Rp3.786,5 triliun sehingga menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan privat pada kelompok sangat terbatas telah melampaui kapasitas fiskal tahunan negara.

PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Per Pulau) dalam Triliun Rupiah	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kawasan Timur (Maluku, Papua, Sulawesi, Bali, & Nusa Tenggara)
Bali & Nusa Tenggara	Rp 464.322	Rp 471.463	Rp 521.033	Rp 569.276	Rp 617.989	Rp 656.345	Rp 705.865	Rp 3.242.540
Sulawesi	Rp 1.052.026	Rp 1.168.693	Rp 1.346.241	Rp 1.457.875	Rp 1.568.829	Rp 1.706.039	Rp 1.832.159	1,43
Maluku & Papua	Rp 371.338	Rp 421.940	Rp 478.803	Rp 529.213	Rp 592.453	Rp 644.695	Rp 704.516	

Metodologi ini membandingkan total kekayaan 50 individu terkaya dengan kapasitas ekonomi kawasan timur Indonesia. Total kekayaan 50 individu terkaya tercatat sebesar Rp4.651 triliun berdasarkan data Forbes. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yang mencakup Bali dan Nusa Tenggara Sulawesi serta Maluku dan Papua berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Pada proyeksi tahun 2026 total PDRB kawasan timur Indonesia mencapai Rp3.242,540 triliun yang merupakan agregasi dari PDRB Bali dan Nusa Tenggara (Rp705,865 triliun), PDRB Sulawesi (Rp1.832,159 triliun), serta PDRB Maluku dan Papua (Rp704,516 triliun). Perbandingan ini menunjukkan bahwa total kekayaan 50 superkaya mencapai 1,4 kali PDRB gabungan kawasan timur Indonesia atas harga dasar berlaku.

⁵⁷ International Council on Clean Transportation (ICCT). (2025). Air and greenhouse gas pollution from private jets, 2023.

https://theicct.org/wp-content/uploads/2025/06/ID-349-%E2%80%93-Private-jets_report_final.pdf

⁵⁸ Asian Sky Group. (2024). Business Jet Fleet Report YE 2024: Asia-Pacific.

<https://www.asianskygroup.com/wp-content/uploads/2025/03/Business-Jet-Fleet-Report-YE2024-Asia-Pacific-EN.pdf>

⁵⁹ International Council on Clean Transportation (ICCT). (2023). Comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars and two-wheelers in Indonesia.

https://theicct.org/wp-content/uploads/2023/09/ID-17-%E2%80%93-LCA-Indonesia_report_final2.pdf

⁶⁰ Nasri dan Utomo. (2015). Prediksi konsumsi bahan bakar minyak untuk kendaraan darat jalan raya sampai tahun 2040 menggunakan software LEAP. Jurnal Teknik Mesin S-1 3, no. 2 (2015): 198–207.

<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jtm>

⁶¹ ibid.

⁶² ibid.

1.7 Kekayaan 50 Superkaya Setara 1,4 Kali PDRB Gabungan Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan Sulawesi

Kalkulasi ini membandingkan agregat antara total kekayaan 50 individu terkaya sebesar Rp4.651 triliun berdasarkan data Forbes (2026) dengan total belanja negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 sebesar Rp3.786,5 triliun sehingga menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan privat pada kelompok sangat terbatas telah melampaui kapasitas fiskal tahunan negara.

1.8 Butuh 603 Tahun untuk Menghabiskan Kekayaan Lima Triliuner Teratas jika Membelanjakan Rp2 Miliar per Hari

Waktu yang nyaris tidak masuk akal untuk menghabiskan seluruh gabungan kekayaan mereka. Bahkan itu dengan syarat tidak ada tambahan pendapatan dari aktivitas bisnis apa pun. Deretan lima triliuner tersebut adalah Budi & Keluarga Hartono, Prajogo Pangestu, Keluarga Widjaja, Low Tuck Kwong dan Anthony Salim. Berdasarkan data Forbes, total kekayaan tercatat sebesar USD128 miliar atau setara Rp2.172 triliun. Simulasi menggunakan asumsi pengeluaran konstan sebesar Rp10 miliar per hari atau Rp2 miliar per hari untuk masing-masing triliuner. Hasil estimasi menunjukkan bahwa diperlukan waktu selama 217.200 hari atau 603 tahun untuk menghabiskan seluruh kekayaan tersebut.

1.9 Sebanyak 58% Kekayaan 50 Orang Terkaya Berasal dari Sektor Ekstraktif

Pendalaman data *Forbes* 2026 menunjukkan bahwa 25 dari 50 triliuner teratas Indonesia teridentifikasi memiliki afiliasi bisnis ekstraktif. Sektor yang dilacak mencakup energi fosil, batubara, minyak dan gas bumi, pertambangan mineral kritis, perkebunan kelapa sawit, komoditas hutan, dan agribisnis. Akumulasi kekayaan para triliuner yang memiliki bisnis ekstraktif tersebut mencapai USD159 atau setara Rp2.690 Triliun. Kekayaan tersebut setara dengan 57,8 persen dari total kekayaan gabungan 50 orang terkaya Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa konsentrasi kekayaan nasional sangat erat kaitannya dengan sektor-sektor yang memiliki dampak ekologis tinggi, risiko sosial besar, serta ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam.

1.10 Buruh Perlu Bekerja selama 2,8 Abad untuk Menyamai Kekayaan 50 Triliuner Teratas

Metodologi ini menghitung durasi waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk menyamai rata-rata kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia berbasis akumulasi pendapatan tahunan. Rata-rata kekayaan per triliuner tercatat sebesar Rp93 Triliun (Rp93.018.335.940.600). Sementara itu, rata-rata upah pekerja berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2025 sebesar Rp3.331.012 per bulan atau Rp39.972.144 per tahun. Perhitungan ini mempertimbangkan pertumbuhan rata-rata upah tahunan menggunakan pendekatan CAGR (compound annual growth rate) sebesar 4,88 persen. Oleh karenanya, peningkatan gaji pekerja bersifat dinamis seiring dengan penambahan pengalaman kerja dan peningkatan keterampilan dan produktivitas. Matrik kalkulasinya sebagai berikut:

$$93.018.335.940.600 = 39.972.144 = \frac{(1+0,0488)^n-1}{0,0488}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 278 tahun atau lebih dari 2,8 abad bagi pekerja untuk menyamai rata-rata kekayaan 50 Triliuner teratas di Indonesia.

1.11 Rata-rata Simpanan Masyarakat Hanya Rp1,67 Juta ketika Simpanan Superkaya Mencapai Rp35,9 Miliar

Rata-rata simpanan masyarakat yang dikalkulasikan berbasis segmentasi nominal rekening untuk menggambarkan distribusi tabungan antar kelompok nasabah. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per September 2025, segmen nasabah dengan saldo di bawah Rp100 juta memiliki total simpanan sebesar Rp1.094 Triliun. Simpanan tersebut tersebar pada 655.220.644 rekening atau sekitar 98,9 persen dari total nasabah. Maka, rata-rata simpanan mencapai Rp1.670.345 per rekening. Sementara itu pada segmen nasabah dengan saldo di atas Rp5 miliar total simpanan mencapai Rp5.463 triliun yang tersebar pada 152.219 rekening. Oleh karenanya, rata-rata simpanan mencapai Rp35,9 miliar (Rp35.886.031.000) per rekening. Perbandingan ini menunjukkan kesenjangan distribusi simpanan yang signifikan.

2

Kontras Kekayaan Elit Negara vs Rakyat

2.1 Total Kekayaan Pejabat Publik Kabinet Merah Putih Mencapai Rp30 Triliun

Distribusi kekayaan pejabat dalam Kabinet Merah Putih diklasifikasikan berdasarkan jabatan merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2026 yang dihimpun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN merupakan instrumen pelaporan wajib yang memuat seluruh aset, penghasilan, dan kewajiban pejabat negara sebagai bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi. Hasil klasifikasi menunjukkan variasi tingkat kekayaan antar jabatan. Secara agregat terdapat 143 pejabat dengan total kekayaan sebesar Rp30,4 Triliun (Rp30.345.249.041.253) dan rata-rata senilai Rp212 miliar. Berikut temuan kekayaan pejabat publik dalam rentang 2019-2025:

Tahun	Total Harta Pejabat Kabinet (Rp Triliun)	Jumlah Pejabat Publik	Rata-rata Kekayaan (Rp Miliar)
2019	13,6	57	238
2020	16,5	59	279
2021	24,0	58	414
2022	28,0	59	475
2023	23,2	61	380
2024	30,4	140	217
2025	30,3	143	212

Secara rata-rata, kekayaan pejabat kabinet mencapai puncaknya pada 2022 sebesar Rp475 miliar per orang. Selanjutnya pada 2024 rata-rata kekayaan berada di angka Rp217 miliar. Penurunan rata-rata kekayaan pada 2024 tidak mencerminkan penurunan kekayaan secara agregat, melainkan dipengaruhi oleh lonjakan jumlah pejabat publik dalam kabinet sehingga memperluas basis perhitungan rata-rata.

2.2 **Sebanyak 73% Kekayaan Kabinet dikuasai hanya oleh 11 Pejabat dengan Kekayaan di atas Rp1 Triliun**

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan dokumen terkait terdapat 12 menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki kekayaan di atas 1 triliun rupiah. Total gabungan kekayaan 11 menteri tersebut mencapai Rp22 triliun (Rp22.028.825.759.366). Nilai ini setara dengan 72.6% dari total kekayaan seluruh menteri dalam kabinet Merah Putih. Data ini menunjukkan konsentrasi kekayaan yang sangat tinggi di tingkat pengambil keputusan negara.

Kekayaan Pejabat Publik Kabinet Merah Putih di Atas Rp1 Triliun

Perlu dicatat bahwa sebagian pejabat belum memenuhi kewajibannya dalam pelaporan data kekayaan pada 2025. Berikut daftar 11 pejabat publik dengan kekayaan di atas Rp1 Triliun berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2024.

1. Widiyanti Putri Wardhana memiliki kekayaan terlapor 2025 sebesar Rp5.436 Milyar (USD 322 juta)
2. Sakti Wahyu Trenggono memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp2.440 Milyar (USD 145 juta)
3. Erick Thohir memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp2.414 Milyar (USD 143 juta)
4. Prabowo Subianto memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp2.062 Milyar (USD 122 juta)
5. Maruarar Sirait memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp1.554 Milyar (USD 92 juta)
6. Otto Hasibuan memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp1.526 Milyar (USD 90,4 juta)
7. Setiawan Ichlas memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp1.519 Milyar (USD 90 juta)
8. Luhut Binsar Pandjaitan memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp1.509 Milyar (USD 89 juta)
9. Amran Sulaiman memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp1.383 Milyar (USD 82 juta)
10. Muhamad Mardiono* memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp1.151 Milyar (USD 68 juta)
11. Raffi Farid Ahmad memiliki kekayaan terlapor sebesar Rp1.034 Milyar (USD 61,3 juta)

*Hanya Muhamad Mardiono yang sudah memperbarui pelaporan LHKPN per Desember 2025

2.3 Dalam Sekali Putaran Pemilu, Ongkos Politik Pemenangan Capres-Cawapres Mencapai Rp9,8 Triliun

Ongkos politik dalam kalkulasi mencakup biaya kampanye, logistik umum, mahar politik dan mobilisasi pemilih. Asumsi biaya pencalonan pada tingkat kabupaten/kota sebesar Rp30 miliar per pasangan calon. Sementara pada tingkat provinsi biaya mencapai Rp100 miliar per pasangan calon. Estimasi dilakukan dengan pendekatan probabilistik sederhana menggunakan ambang kemenangan mayoritas sebesar 51 persen. Pada tingkat provinsi diasumsikan terdapat 38 provinsi. Pada tingkat kabupaten atau kota terdapat 517 daerah. Total kebutuhan biaya dihitung sebagai fungsi dari proporsi kemenangan, jumlah wilayah, dan biaya rata rata per kontestasi. Berikut matriks kalkulasinya:

Total biaya = (51% × jumlah provinsi × biaya per provinsi) + (51% × jumlah kabupaten kota × biaya per kabupaten kota)

Total biaya = (0,51 × 38 × Rp100 miliar) + (0,51 × 517 × Rp30 miliar)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ongkos politik pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada tingkat provinsi sebesar Rp1,938 triliun. Pada tingkat kabupaten atau kota sebesar Rp7,9101 triliun. Total biaya pemenangan mencapai Rp9,8481 triliun.

2.4 Seorang Buruh Perlu Bekerja selama 2 Abad untuk Menyamai Kekayaan Presiden RI.

Metodologi ini mengestimasi durasi waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk menyamai kekayaan Presiden Republik Indonesia dengan pendekatan akumulasi pendapatan tahunan yang tumbuh secara majemuk. Berdasarkan LHKPN (2024), Nilai kekayaan Presiden Prabowo Subianto terlapor sebesar Rp2.062.241.012.691. Rata rata upah pekerja berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2025 sebesar Rp3.331.012 per bulan atau Rp39.972.144 per tahun. Dalam skenario ini diasumsikan bahwa hanya 20% dari pendapatan yang dapat ditabung, yaitu sebesar Rp7.994.429 per tahun. Pertumbuhan rata-rata upah tahunan (CAGR) diasumsikan sebesar 4,88 persen per tahun. Oleh karenanya, peningkatan gaji pekerja bersifat dinamis seiring dengan penambahan pengalaman kerja dan peningkatan keterampilan dan produktivitas. Matriks kalkulasinya sebagai berikut:

$$2.062.241.012.691 = 7.994.429 \times \frac{(1+0,0488)^n-1}{0,0488}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 2 abad (198 tahun) bagi pekerja untuk menyamai tingkat kekayaan Prabowo Subianto

2.5 Generasi Muda Membutuhkan 104 Tahun untuk Menyamai Kekayaan Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan LHKPN (2025), nilai kekayaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar Rp27.915.654.176. Rata rata upah pekerja kelompok usia 35 sampai 39 tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2025 sebesar Rp4.024.911,25 per bulan atau Rp48.298.935 per tahun. Dalam skenario ini diasumsikan bahwa pekerja hanya dapat menabung 20% dari pendapatannya, yaitu sebesar Rp9.659.787 per tahun. Pertumbuhan upah diasumsikan sebesar 4,88 persen per tahun. Matriks kalkulasinya sebagai berikut:

$$27.915.654.176 = 9.659.787 \cdot \frac{(1+0,0488)^n-1}{0,0488}$$

Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa seorang pekerja yang mulai menabung gajinya di usia 35-39 membutuhkan sekitar 104 tahun masa kerja untuk dapat menyamai tingkat kekayaan Gibran Rakabuming Raka dalam skenario akumulasi pendapatan tanpa pengeluaran konsumsi apapun.

2.6 Setiap Tamtama Membutuhkan 252 Tahun Masa Tugas untuk Menyamai Kekayaan Panglima TNI.

Berdasarkan LHKPN, Panglima TNI Agus Subiyanto melaporkan kekayaan sebesar Rp20,5 miliar pada 2024. Kekayaannya melonjak 29 kali lipat jika dibandingkan pelaporan tahun 2019 sebesar Rp714 juta. Kenaikan rata-rata tahunan sebesar 137% sehingga kekayaannya bertambah Rp5 milyar setiap tahun.

Di sisi lain, prajurit tamtama sebagai tulang punggung operasional TNI hanya menerima gaji sekitar Rp2,4 juta per bulan. Dengan demikian, gaji pokoknya setara dengan Rp28,8 juta per tahun. Namun dalam skenario yang lebih realistis, diasumsikan bahwa setelah kebutuhan konsumsi pokok dipenuhi, hanya 20% dari gaji yang dapat ditabung. Artinya, akumulasi yang dihitung bukan berasal dari seluruh gaji tahunan, melainkan hanya Rp5,76 juta per tahun. Adapun laju rata-rata kenaikan gaji pokok tahunan diasumsikan sebesar 1,63 persen, merujuk pada struktur kenaikan gaji anggota TNI dan Polri.

Dengan pendekatan akumulasi pendapatan tahunan yang tumbuh secara majemuk, persamaan yang digunakan adalah:

$$20.500.000.000 = 5.760.000 \cdot \frac{(1+0.0163)^n - 1}{0.0163}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara matematis seorang tamtama harus menabung sekitar 252 tahun untuk dapat menyamai kekayaan Panglima TNI. Estimasi ini bahkan masih merepresentasikan skenario yang sangat minimal, karena mengandaikan tabungan berlangsung terus-menerus, tanpa gangguan.

2.7 Setiap Polisi Golongan Rendah Membutuhkan 233 Tahun Masa Tugas untuk Menyamai Kekayaan Kapolri.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo melaporkan kekayaan pada LHKPN 2026 sebesar Rp14.988.070.576. Apabila dibandingkan dengan harta terlapornya pada 2019 sebesar Rp8.664.735.000, maka kekayaannya telah bertambah sekitar Rp1,26 miliar tiap tahun. Lonjakan kekayaannya rata-rata tahunannya mencapai 73,09%.

Sebaliknya, gaji rata-rata personel Polri golongan terendah hanya sekitar Rp2,4 juta per bulan. Dalam pendekatan yang lebih realistis, diasumsikan bahwa setelah memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, hanya 20 persen dari pendapatan yang dapat ditabung, sehingga akumulasi tahunan yang dihitung sebesar Rp5,76 juta. Laju rata-rata kenaikan gaji pokok tahunan diasumsikan sebesar 1,63 persen, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan gaji anggota TNI dan Polri. Asumsi ini disusun berdasarkan rata-rata kenaikan nominal gaji pokok yang diperoleh dari perbandingan struktur gaji antar jenjang kepangkatan prajurit tingkat bawah, mulai dari Bhayangkara Dua (Bharada) hingga Ajun Brigadir Polisi (ABP), dengan masa jabatan 0 hingga 28 bulan.

$$14.988.070.576 = 5.760.000 \cdot \frac{(1+0.0163)^n - 1}{0.0163}$$

Dengan struktur pendapatan dan asumsi tabungan tersebut, secara matematis dibutuhkan sekitar 233 tahun masa kerja bagi personel Polri di lapisan terbawah untuk dapat menyamai total kekayaan Kapolri. Estimasi ini bahkan masih merepresentasikan batas minimum durasi, karena mengasumsikan seluruh tabungan terakumulasi secara konsisten tanpa gangguan. Pendekatan ini sengaja digunakan untuk menghindari bias optimistik, dengan tidak memasukkan faktor promosi luar biasa, tunjangan kinerja, maupun sumber pendapatan tambahan nonstruktural lainnya.

2.8 Total Kekayaan Anggota DPR RI Mencapai Rp26,6 Triliun dan DPD RI sebesar Rp2,26 Triliun.

Agregasi total kekayaan legislator menjumlahkan seluruh nilai harta yang dilaporkan setiap anggota dalam LHKPN. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata kekayaan dengan membagi total kekayaan terhadap jumlah anggota pada masing-masing institusi. Keanggotaan DPR RI sejumlah 578 legislator tercatat memiliki kekayaan agregat mencapai Rp26 Triliun (Rp26.602.246.335.901) dengan rata-rata kekayaan sebesar Rp40 Miliar (Rp40.321.308.509). Sementara anggota DPD RI memiliki total kekayaan sebesar Rp2 Triliun (Rp2.260.705.481.058) dengan jumlah anggota 152 orang yang rata-rata kekayaannya sebesar Rp14 Miliar (Rp14.873.062.375). Rincian kekayaan anggota DPD RI dan DPR RI tersajikan dalam tabel berikut:

No	Provinsi	Jumlah Kekayaan Anggota DPR RI	Jumlah Kekayaan Anggota DPD RI
1	Aceh	Rp 308.439.189.344	Rp 14.411.717.928
2	Sumatera Utara	Rp 1.520.102.749.967	Rp 20.020.155.106
3	Sumatera Barat	Rp 390.555.723.299	Rp 57.196.617.075
4	Riau	Rp 123.131.201.961	Rp 9.597.118.640
5	Jambi	Rp 234.898.468.435	Rp 40.763.760.777
6	Sumatera Selatan	Rp 286.731.412.197	Rp 22.078.442.007
7	Bengkulu	Rp 64.997.896.552	Rp 27.341.814.646
8	Lampung	Rp 560.838.404.901	Rp 16.172.188.743
9	Bangka Belitung	Rp 178.160.224.320	Rp 14.214.470.200
10	Kepulauan Riau	Rp 56.260.142.950	Rp 9.597.118.640
11	DKI Jakarta	Rp 1.990.235.008.900	Rp 82.631.546.116
12	Jawa Barat	Rp 4.787.427.029.943	Rp 149.288.013.802
13	Jawa Tengah	Rp 3.575.928.907.510	Rp 21.029.798.005
14	DI. Yogyakarta	Rp 797.833.053.846	Rp 53.563.895.659
15	Jawa Timur	Rp 5.404.587.695.301	Rp 123.146.322.195
16	Banten	Rp 871.871.286.992	Rp 51.423.786.120
17	Bali	Rp 582.754.480.320	Rp 129.196.967.887
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 129.644.546.668	Rp 37.550.283.728
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 600.967.452.388	Rp 251.714.284.934
20	Kalimantan Barat	Rp 364.449.205.142	Rp 33.091.904.863
21	Kalimantan Tengah	Rp 73.242.057.859	Rp 76.665.654.709
22	Kalimantan Selatan	Rp 228.761.334.266	Rp 27.203.424.318
23	Kalimantan Timur	Rp 297.329.891.443	Rp 69.472.417.631
24	Kalimantan Utara	Rp 71.815.255.944	Rp 12.435.437.104
25	Sulawesi Utara	Rp 299.275.431.230	Rp 105.801.299.330
26	Sulawesi Tengah	Rp 220.533.202.659	Rp 26.352.791.889
27	Sulawesi Selatan	Rp 1.058.593.719.581	Rp 35.639.982.398
28	Sulawesi Tenggara	Rp 110.450.781.068	Rp 170.126.003.487
29	Gorontalo	Rp 539.253.169.378	Rp 170.009.991.001
30	Sulawesi Barat	Rp 25.675.955.559	Rp 28.461.817.778
31	Maluku	Rp 26.129.017.252	Rp 125.312.291.848
32	Maluku Utara	Rp 7.755.608.000	Rp 103.982.354.535
33	Papua Barat	Rp 38.499.461.046	Rp 8.372.357.688
34	Papua Barat Daya	Rp 330.544.084.229	Rp 5.794.228.139
35	Papua	Rp 45.652.304.200	Rp 5.567.407.812
36	Papua Selatan	Rp 50.837.195.252	Rp 14.023.198.992
37	Papua Tengah	Rp 317.256.854.427	Rp 87.750.864.610
38	Papua Pegunungan	Rp 30.826.931.572	Rp 6.100.257.675
	Jumlah Kekayaan	Rp 26.602.246.335.901	Rp 2.243.101.988.015
	Rat-rata Kekayaan	Rp 1.057.921.069.649	Rp 89.435.845.162

2.9 **Legislator dari Dapil Gorontalo Memiliki Rata-rata Kekayaan 810 Kali Lipat dibandingkan Rata-rata Kekayaan Penduduknya.**

Pengukuran kesenjangan antara tingkat kesejahteraan masyarakat dan kekayaan perwakilan legislatifnya menggunakan pendekatan komparatif berbasis rasio. Ketiadaan data rata-rata kekayaan penduduk pada tingkat provinsi menjadi dasar penggunaan basis upah pekerja dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2025. Estimasi rata-rata kekayaan penduduk dibangun dari pendekatan sederhana yang menghubungkan upah pekerja dengan proses akumulasi sepanjang usia produktif. Pendapatan rata-rata pekerja diasumsikan tidak sama dengan upah, melainkan lebih tinggi untuk mencerminkan distribusi upah riil di pasar tenaga kerja. Dalam model ini digunakan faktor pengali sebesar 1,4 kali UMP bulanan sebagai pendekatan konservatif terhadap rata-rata pendapatan pekerja. Pendapatan bulanan ini kemudian dikonversi menjadi pendapatan tahunan dengan mengalikan 12 bulan.

Total pendapatan tahunan tersebut diasumsikan terdapat tingkat tabungan rata-rata sebesar 15 persen. Angka ini merepresentasikan proporsi pendapatan yang secara realistis dapat disisihkan oleh rumah tangga setelah memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Tabungan tahunan yang dihasilkan kemudian diasumsikan terakumulasi selama 25 tahun masa kerja efektif. Periode ini dipilih untuk merepresentasikan fase produktif di mana individu memiliki kapasitas relatif stabil untuk menabung, dengan mempertimbangkan dinamika siklus hidup seperti awal karier dan penurunan produktivitas menjelang usia pensiun. Mengingat kekayaan tidak semata berasal dari tabungan finansial, ditambahkan faktor pengali sebesar 1,5 untuk menangkap keberadaan aset non-upah. Dengan menggabungkan seluruh asumsi tersebut, diperoleh formulasi estimasi kekayaan sebagai berikut: $\text{kekayaan} = 1,4 \times \text{UMP} \times 12 \times 0,15 \times 25 \times 1,5$. Penyederhanaan dari persamaan ini menghasilkan koefisien sekitar 94,5 kali UMP bulanan

Konteks Provinsi Gorontalo menunjukkan rasio rata-rata kekayaan paling timpang. Rata rata kekayaan gabungan legislatif DPD RI dan DPR RI mencapai Rp222 Miliar (Rp222.253.554.209). Apabila dibandingkan dengan rata-rata kekayaan penduduk sebesar Rp274.484.700, legislator dari daerah pemilihan Gorontalo memiliki kekayaan 810 kali lipat rata-rata kekayaan penduduk yang diwakilinya. Rasio ini mencerminkan perbandingan kontras antara akumulasi modal elit politik dengan warga yang diwakilinya.

2.10 **Potensi Penerimaan Pajak Kekayaan dari Pejabat Eksekutif dan Legislatif Mencapai Rp752 Miliar.**

Kalkulasi ini berbasis kekayaan penyelenggara negara dari LHKPN (2024) yang diagregasikan ke dalam kelompok Anggota DPD RI, DPR RI, dan Eksekutif.

Unit analisis dibatasi pada pejabat dengan kekayaan di atas Rp84 miliar dan Rp506 miliar sebagai proksi kelompok high net worth dan ultra high net worth. Tarif progresif pajak kekayaan sebesar 1 persen diterapkan untuk lapisan Rp84–506 miliar. Tarif 2 persen diterapkan untuk lapisan di atas Rp506 miliar. Perhitungan dilakukan secara parsial pada basis kena pajak di setiap lapisan dan bukan pada total kekayaan. Hasil estimasi menunjukkan potensi pajak kekayaan pada Anggota DPD RI sebesar Rp8,86 miliar (Rp8.857.815.178), Anggota DPR RI sebesar Rp232,62 miliar (Rp232.623.904.841), dan pejabat eksekutif dalam Kabinet Merah Putih sebesar Rp510,84 miliar (Rp510.835.167.077). Dengan demikian, hasil agregat potensi pajak kekayaan untuk pejabat eksekutif dan legislatif mencapai Rp752,32 miliar (Rp752.316.887.096).

2.11 Sebanyak 9 Pejabat Publik di Kabinet Merah Putih Merangkap sebagai Ketua Umum Partai Politik dengan Penguasaan Tiga per Lima Suara Sah Nasional.

Delapan figur ini memegang dua posisi strategis sekaligus yaitu sebagai pimpinan tertinggi partai politik dan sebagai pengambil keputusan rumpun eksekutif di bawah Kabinet Merah Putih.

1. Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. memperoleh suara sah nasional pada 2024 sebesar 20.071.708 suara (13,22% dari total suara sah nasional)
2. Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pada saat yang sama merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB memperoleh suara sah nasional pada 2024 sebesar 16.115.655 suara (10,62%)
3. Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar memperoleh suara sah nasional pada 2024 sebesar 23.208.654 suara (15,29%)
4. Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Partai Demokrat memperoleh suara sah nasional pada 2024 sebesar 11.283.160 suara (7,43%)
5. Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). PAN memperoleh suara sah nasional pada 2024 sebesar 10.984.003 suara (7,24%)
6. Muhammad Mardiono menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan sekaligus merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP memperoleh suara sah nasional pada 2024 sebesar 5.878.777 suara (3,87%)
7. Muhammad Anis Matta menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dengan perolehan suara sah nasional pada 2024 sebesar 1.281.991 (0,84%)
8. Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Presiden Bidang UMKM turut menjabat sebagai Ketua Umum Partai Garuda dengan perolehan suara sah nasional pada 2024 sebesar 406.883 (0,27%)
9. Agus Jabo Priyono menjabat sebagai Wakil Menteri Sosial dan pada saat yang sama merupakan Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sebanyak 7 dari 8 ketua umum partai politik yang terafiliasi merangkap jabatan di kabinet Merah Putih telah terlibat dalam kontestasi Pemilihan Legislatif 2024. Tujuh partai tersebut menguasai lebih dari dua pertiga suara sah nasional atau sebesar 58,78% (89.230.831 suara)

2.12 Empat Pejabat Kabinet Merah Putih Terafiliasi Dekat dengan Bisnis Ekstraktif

Terdapat lima pejabat publik dalam kabinet Merah Putih yang teridentifikasi memiliki afiliasi kuat dengan bisnis ekstraktif. Diantaranya Prabowo Subianto, Widiyanti Putri Wardhana, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Bahlil Lahadalia. Pendalaman JATAM mengungkapkan afiliasi Prabowo Subianto dengan perusahaan ekstraktif melalui kepemilikan saham PT.Nusantara Energy (luasan konsesi 4.793 hektar).⁶³ Perusahaan dalam jaringannya, meliputi PT Nusantara Kaltim Coal (luasan konsesi 11.040 ha) PT Nusantara Wahau (luasan konsesi 14.890 ha) Coal PT Nusantara Energindo Coal dan PT Erabara Persada Nusantara (luasan konsesi 14.980 ha) yang bergerak di pertambangan batubara. Selain sektor tambang Prabowo juga terhubung dengan perusahaan kehutanan dan perkebunan berskala besar yang mengelola konsesi lahan luas. Diantaranya PT Tanjung Redeb Hutani (luasan konsesi 180.330 hektare), PT Kertas Nusantara (luasan konsesi 223.500 ha), dan PT Kiani Hutani Lestari (53.083 ha).

Widiyanti Putri Wardhana memiliki keterkaitan langsung dengan sektor perkebunan kelapa sawit melalui perannya di PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN), perusahaan agribisnis yang bergerak di pengelolaan perkebunan dan pabrik crude palm oil. Widiyanti Putri menjadi Komisaris TLDN sejak 23 November 2021, sampai dengan masa jabatan 2024. Widiyanti tercatat sebagai Komisaris PT Teladan Prima Agro sejak 2021 setelah sebelumnya menjabat Direktur di perusahaan yang sama sejak 2012.⁶⁴ Dia tercatat tidak memiliki saham secara langsung pada TLDN, tetapi memiliki saham secara tidak langsung di perseroan sebesar 8,14% melalui PT Teladan Resources. Ia juga pernah menjadi komisaris di beberapa anak usaha perusahaan sejak awal 2010-an.

Luhut Binsar Pandjaitan memiliki afiliasi langsung dengan bisnis ekstraktif melalui pendirian dan kepemilikan di kelompok usaha PT Toba Sejahtera.⁶⁵ Grup ini menaungi perusahaan pertambangan dan energi seperti PT Toba Bara Sejahtera Tbk yang bergerak di batubara, PT Adimitra Baratama Nusantara (luasan konsesi 2.990 ha), PT Kutai Energi (luasan hektare 6.892 ha) PT Trisensa Mineral Utama (luasan konsesi 3.414) dan PT Indomining (luasan konsesi 683 ha) yang juga beroperasi di sektor batubara. Selain itu terdapat keterlibatan pada usaha migas

⁶³ Jaringan Advokasi Tambang. (2024). Basis data pemilu dan oligarki ekstraktif. <https://pemilu.jatam.org/>

⁶⁴ Bisnis.com. (2024, Oktober 15). *Deretan emiten yang terafiliasi calon menteri kabinet Prabowo*. *Market Bisnis.com*.

⁶⁵ Jaringan Advokasi Tambang. (2024). Basis data pemilu dan oligarki ekstraktif. <https://pemilu.jatam.org/>

dan energi primer yang tercatat dalam jaringan perusahaan grup tersebut.

Bahlil Lahadalia memiliki kepemilikan saham langsung di perusahaan ekstraktif sebelum menjabat sebagai pejabat publik. Ia tercatat sebagai pemegang saham mayoritas di PT Bersama Papua Unggul.⁶⁶ Perusahaan ini menguasai PT Meta Mineral Pradana (luasan konsesi 470 ha dan 165,5 ha) yang bergerak di pertambangan nikel di Sulawesi. Informasi kepemilikan ini diungkap dalam laporan investigasi organisasi pemantau pertambangan dan dokumen badan hukum perseroan.

⁶⁶ Jaringan Advokasi Tambang. (2024). Basis data pemilu dan oligarki ekstraktif. <https://pemilu.jatam.org/>

3

Pajak Kekayaan 50 Triliuner Bisa Buat Apa?

3.1 Potensi Penerimaan Negara dari Pajak Kekayaan Milik 50 Orang Terkaya di Indonesia mencapai Rp93 Triliun

Klasemen 50 triliuner teratas di Indonesia dalam analisis ini disusun berdasarkan publikasi *The Richest People in the World* oleh Forbes per 10 Maret 2026, dengan pendekatan *country deepening* melalui penyaringan individu berdasarkan kewarganegaraan dan basis utama aktivitas ekonomi di Indonesia. Estimasi kekayaan bersih (*net worth*) mengacu pada metodologi Forbes yang menggabungkan valuasi aset publik, kepemilikan bisnis privat, serta berbagai instrumen kekayaan lainnya yang sensitif terhadap dinamika pasar dan nilai tukar. Namun, terdapat keterbatasan pembaruan data di mana 18 dari 50 individu masih menggunakan estimasi per 11 Desember 2025, sehingga analisis ini menerapkan pendekatan *mixed-year estimation (2025–2026)* dengan asumsi tidak terjadi perubahan ekstrem yang secara signifikan menggeser posisi relatif antar individu dalam jangka pendek. Dengan demikian, klasemen ini lebih merepresentasikan struktur dan konsentrasi kekayaan serta validitas komparatif peringkat, alih-alih sebagai refleksi nilai absolut yang sepenuhnya mutakhir pada satu titik waktu, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan inheren terkait transparansi dan kompleksitas kepemilikan aset ultra-kaya.

No	Name	2026		CAGR
		Harta Kekayaan (dalam Triliun Rupiah)	Pajak Kekayaan (dalam Miliar Rupiah)	
1	Haryanto Tjiptodihardjo	84.4	1688	71.0%
2	Marina Budiman	113.09	2262	47.9%
3	Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	108.03	2161	42.2%
4	Han Arming Hanafia	74.27	1485	41.4%
5	Otto Toto Sugiri	158.66	3173	40.7%
6	Low Tuck Kwong	340.96	6819	38.4%
7	Sjamsul Nursalim	47.26	945	36.5%
8	Prajogo Pangestu	482.74	9655	36.0%
9	Manoj Punjabi	55.7	1114	31.5%
10	Wijono* & Hermanto Tanoko family	50.64	1013	27.4%
11	Tahir & family	178.92	3578	18.1%
12	Widjaja family	477.68	9554	16.7%
13	Jogi Hendra Atmadja & family	59.08	1182	15.2%
14	Hamami family	28.69	574	14.5%
15	Sulistyo family	24.47	489	13.2%
16	Sukanto Tanoto	72.58	1452	12.7%
17	Arini Subianto & family	40.51	810	12.7%
18	Martua Sitorus	60.76	1215	12.6%
19	Theodore Rachmat	75.96	1519	12.4%
20	Anthony Salim & family	221.11	4422	8.7%

No	Name	2026		CAGR
		Harta Kekayaan (dalam Triliun Rupiah)	Pajak Kekayaan (dalam Miliar Rupiah)	
21	R. Budi & Michael Hartono	649.84	12997	8.5%
22	Irwan Hidayat & family	19.41	388	8.1%
23	Peter Sondakh	64.14	1283	7.8%
24	Sri Prakash Lohia	145.16	2903	7.4%
25	Bambang Sutantio	35.45	709	7.0%
26	Djoko Susanto	42.2	844	6.8%
27	Garibaldi Thohir & family	64.14	1283	4.8%
28	Putera Sampoerna & family	42.2	844	3.3%
29	Ciputra family	27.01	540	3.0%
30	Agoes Projosasmito	99.59	1992	3.0%
31	Bachtiar & Burhan, Bahari Karim family	70.89	1418	2.8%
32	Alexander Ramlie	45.57	911	2.6%
33	Husodo Angkosubroto & family	25.32	506	2.3%
34	Hilmi Panigoro & family	48.95	979	1.2%
35	Ciliandra* & Wirastuty Fangiono family	25.32	506	0.7%
36	Mochtar Riady & family	37.13	743	0.5%
37	Chairul Tanjung	82.71	1654	0.0%
38	Hary Tanoesoedibjo	18.57	371	0.0%
39	Jenny Quantero & Engki Wibowo	24.97	499	-0.5%
40	Soegiarto Adikoesoemo	21.94	439	-0.7%
41	Husain Djojonegoro & family	15.53	311	-0.8%
42	Eddy Sugianto	18.57	371	-2.9%
43	Lim Chai Hock	21.94	439	-3.6%
44	Hartati Murdaya Family	21.1	422	-4.1%
45	Dewi Kam	60.76	1215	-5.0%
46	Eddy Katuari & family	16.79	336	-5.2%
47	Setiawan & family	60.76	1215	-5.8%
48	Susilo Wonowidjojo & family	54.01	1080	-7.7%
49	Eddy Kusnadi Sariaatmadja & family	18.57	371	-8.1%
50	Edwin Soeryadjana & family	16.88	338	-9.6%
Jumlah		2116.53	42329	

3.2 Jika Seluruh Superkaya dengan Nilai Aset di Atas Rp84 Miliar di Indonesia Dikenakan Pajak Kekayaan, akan Terkumpul Rp142 Triliun

Estimasi potensi penerimaan pajak kekayaan ini merujuk Global Wealth Tax Simulator (2026) yang diolah sesuai kebutuhan studi ini. Simulasi statis berbasis distribusi kekayaan bersih (net wealth). Klasifikasi dibagi kedalam tiga kelompok. Kelompok pertama merupakan individu dengan kekayaan di bawah Rp84 miliar yang tidak dikenakan pajak kekayaan atau bertarif 0%. Kelompok kedua memiliki kekayaan antara Rp84-506 miliar dengan tarif 1 persen. Kelompok ketiga memiliki kekayaan di atas Rp506 miliar dengan tarif sebesar 2 persen. Jumlah individu dan basis pajak pada tiap kelompok dihitung dari integrasi data survei rumah tangga dan neraca kekayaan. Estimasi ini juga mencakup aset finansial dan non finansial. Potensi penerimaan dihitung dengan mengalikan tarif progresif pada masing masing kelompok terhadap total kekayaan kena pajak. Dengan demikian, total potensi penerimaan mencapai Rp142,21 juta miliar (Rp142.205.575 miliar). Kontribusi terbesar berasal dari kelompok ultra kaya. Temuan ini menunjukkan tingginya konsentrasi kekayaan pada lapisan teratas distribusi.

3.3 Pajak Kekayaan 2% dari 50 Orang Terkaya Bisa Mengangkat Lebih dari Separuh Penduduk Miskin dalam 2 Tahun

Estimasi berbasis data kemiskinan terbaru dari Badan Pusat Statistik yang mencatat 23,36 juta penduduk miskin atau 8,25 persen populasi. Garis kemiskinan diasumsikan dalam kisaran Rp550 ribu hingga Rp600 ribu per kapita per bulan dengan titik tengah Rp575 ribu atau sekitar Rp6,9 juta per tahun. Simulasi menggunakan alokasi dana Rp93 triliun yang didistribusikan merata kepada seluruh penduduk miskin sehingga menghasilkan transfer sekitar Rp3,98 juta per tahun atau Rp331 ribu per bulan per individu. Estimasi dampak didasarkan pada asumsi bahwa sekitar 50 persen penduduk miskin berada di sekitar garis kemiskinan sehingga tambahan pendapatan tersebut berpotensi mendorong sebagian dari kelompok ini keluar dari kemiskinan dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun. Pendekatan ini tidak memperhitungkan variasi kedalaman kemiskinan antar rumah tangga. Estimasi ini juga tidak mengakomodasi dinamika masuk dan keluar kemiskinan akibat faktor seperti kehilangan pekerjaan, gagal panen, penyakit, atau krisis ekonomi sehingga hasilnya mencerminkan batas atas dampak dalam kerangka distribusi langsung.

3.4 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Membangun 387 Ribu Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Akumulasi pajak kekayaan dari 50 triliuner terkaya berdasarkan Forbes 2023 mencapai Rp93,02 triliun per tahun. Penghitungan ini berupaya mengestimasi kesesuaian alokasi pajak kekayaan triliuner untuk pembangunan rumah bagi masyarakat miskin tunawisma. Asumsi yang digunakan adalah skema Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan rata-rata biaya yang diperlukan sebesar Rp240 juta per rumah. Rumah MBR yang dimaksud memiliki luas area bangunan sekitar 21–36 meter persegi dengan luas lahan 60–200 meter persegi. Temuan menunjukkan bahwa hanya sekitar 2% dari kekayaan 50 triliuner dapat membangun 387.576 rumah baru dalam skema MBR.

3.5 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Menjamin 21,7 Juta Masyarakat Terpenuhi Kebutuhan Hidup Layaknya

Akumulasi pajak kekayaan dari 50 triliuner teratas mencapai Rp93,02 triliun per tahun. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini menetapkan besaran *basic income* (pendapatan dasar) sesuai rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) senilai RpRp4.281.201 per penerima. Berdasarkan penghitungan tersebut, pajak kekayaan 50 triliuner dapat memberikan bantuan sosial kepada 21,7 juta orang di seluruh Indonesia.

3.6 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Memberikan Beasiswa kepada 1,2 Juta Mahasiswa hingga Lulus

Akumulasi pajak kekayaan dari 50 triliuner teratas berdasarkan Forbes 2023 mencapai Rp93,02 triliun per tahun. Berdasarkan data Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) tahun 2024, biaya rata-rata Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di perguruan tinggi negeri adalah Rp19.010.000 per tahun. Dengan alokasi dana tersebut, pajak kekayaan 50 triliuner teratas dapat membiayai biaya kuliah hingga lulus kepada 1.223.282 mahasiswa di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan potensi besar pajak kekayaan untuk memperluas akses pendidikan tinggi nasional.

3.7 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Memberikan 41,34 Juta Ton Pupuk kepada Petani

Akumulasi pajak kekayaan dari 50 triliuner terkaya mencapai Rp93,02 triliun per tahun. Penghitungan ini berupaya mengestimasi kesesuaian alokasi pajak kekayaan untuk mendistribusikan pupuk kepada petani di seluruh Indonesia. Asumsi yang digunakan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Urea sebesar Rp2.250 per kilogram. Dengan demikian, pajak kekayaan dari 50 triliuner dapat menyediakan 41.341.482 ton kg atau sekitar 41,3 juta ton pupuk Urea. Jumlah yang sangat signifikan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

3.8 Alokasi Pajak Kekayaan dapat Mengurangi Kepadatan KRL dengan Penambahan 40 Rangkaian Baru dan Menggratiskan Layanan selama 8 Tahun

Dengan pajak kekayaan sebesar Rp93,02 triliun, penumpukan KRL dapat dihilangkan sekaligus layanan digratiskan dalam jangka panjang melalui penambahan 40 rangkaian agar total mencapai 130 hingga 140 rangkaian dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp6,7 triliun asumsi 30 rangkaian Rp5 triliun sehingga tersisa Rp86,32 triliun. Tren jumlah penumpang KRL di Jabodetabek sepanjang 2025 mencapai 329.311.251 perjalanan. Sementara tarif rata-rata Rp5.000, maka biaya yang dibayar pengguna Rp1,65 triliun ditambah subsidi operasional kereta api Rp9 triliun per tahun sehingga total kebutuhan untuk menggratiskan KRL Rp10,65 triliun per tahun. Alokasi tersebut mampu membiayai sekitar 8 tahun layanan gratis penuh sekaligus memastikan kapasitas sistem tidak lagi mengalami penumpukan

3.9 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Membiayai 465 Ribu Penelitian Ilmiah

Akumulasi pajak kekayaan dari 50 triliuner teratas mencapai Rp93,02 triliun per tahun. Dengan asumsi biaya satu penelitian ilmiah sebesar Rp200 juta, maka pajak kekayaan 50 triliuner teratas dapat membiayai 465.091 penelitian ilmiah di berbagai bidang. Pendanaan ini dapat memperkuat inovasi nasional, meningkatkan daya saing riset, dan memperluas basis pengetahuan untuk pembangunan berbasis sains di Indonesia.

3.10 Jika Pajak Kekayaan Diinvestasikan Dalam Pembangkit Listrik Mikrohidro, Kapasitas Energi Nasional Dapat Meningkatkan hingga 1,76 Giga Watt.

Akumulasi pajak kekayaan dari 50 triliuner teratas mencapai Rp93,02 triliun per tahun. Berdasarkan asumsi biaya investasi energi baru terbarukan berbasis komunitas sebesar Rp52.990.200 per kilowatt (KW) seperti dikalkulasikan oleh Celios, pajak kekayaan tersebut dapat diinvestasikan untuk membangun pembangkit listrik mikrohidro dengan total kapasitas mencapai 1.755.350 kW atau sekitar 1,76 GW. Angka ini memperlihatkan potensi pajak kekayaan dalam mempercepat transisi energi bersih di tingkat lokal.

3.11 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Membeli Lebih dari 5,8 Juta Unit Lampu Tenaga Surya untuk Desa-Desa Terpencil.

Akumulasi pajak kekayaan dari 50 triliuner terkaya mencapai Rp93,02 triliun per tahun. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan biaya pembelian lampu tenaga surya sebesar Rp15.992.000 per unit. Berdasarkan nilai tersebut, pajak kekayaan 50 triliuner teratas dapat menyediakan 5.816.177 unit lampu tenaga surya yang akan menerangi desa-desa tanpa akses listrik di berbagai wilayah terpencil Indonesia.

3.12 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Merestorasi 5,47 Juta Hektare Hutan Hujan Tropis

Akumulasi pajak kekayaan dari 50 triliuner teratas mencapai Rp93,02 triliun per tahun. Perhitungan ini menggunakan asumsi biaya rata-rata pemulihan hutan tropis senilai Rp17 juta per hektare.

Dengan nilai tersebut, pajak kekayaan dapat memulihkan 5.471.666 hektare hutan hujan tropis. Alternatif ini membuktikan bahwa pajak kekayaan dapat menjadi instrumen potensial dalam mitigasi perubahan iklim.

3.13 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Menanggung 180 Juta Warga Penerima Bantuan Iuran BPJS

Estimasi jumlah penerima manfaat BPJS dihitung menggunakan pendekatan pembiayaan tahunan per individu. Biaya per orang per tahun diturunkan dari iuran bulanan sebesar Rp42.000⁶⁷ yang dikalikan dengan 12 bulan. Nilai tersebut menjadi dasar kebutuhan biaya tahunan per peserta. Jumlah penerima kemudian diperoleh dengan membagi total anggaran sebesar Rp93,02 triliun dengan biaya tahunan per orang. Pendekatan ini mengasumsikan iuran bersifat konstan sepanjang tahun. Dengan metode tersebut kapasitas pembiayaan diestimasi mencapai sekitar 180 juta orang selama satu tahun.

3.14 Seluruh Pengemudi Ojek Online di Indonesia Menerima Subsidi Perawatan Kendaraan sebesar 13,3 Juta per Tahun

Perhitungan ini membagi total anggaran dengan jumlah penerima untuk mendapatkan nilai bantuan per orang per tahun. Selanjutnya membagi hasilnya dalam 12 bulan untuk memperoleh nilai per bulan. Dengan demikian, secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{bantuan per orang per bulan} &= (\text{total anggaran} \div \text{jumlah penerima}) \div 12 \\ &= \text{Rp}93.018.335.940.600 \div 7.000.000^{68} \\ &= \text{Rp}13.288.333 \div 12 \\ &= \text{Rp}1.107.361 \end{aligned}$$

Hasilnya subsidi perawatan kendaraan yang diterima seluruh pengemudi ojek di Indonesia sebesar Rp13,29 juta per orang per tahun, atau sekitar Rp1,1 juta per bulan.

⁶⁷ <https://www.kompas.tv/ekonomi/649624/purbaya-tegaskan-anggaran-pbi-bpjs-aman-96-8-juta-peserta-dijamin-apbn-2026>

⁶⁸ detikcom <https://share.google/f9Shs8bpQ7lmsbrCX>

3.15 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Menggaji Seluruh Guru Honorer Sebesar 4,35 Juta Selama 2 Tahun Penuh

Estimasi dilakukan dengan membagi total anggaran dengan jumlah guru honorer untuk mendapatkan alokasi per orang selama 2 tahun, lalu membaginya lagi dengan jumlah bulan (24 bulan) untuk memperoleh gaji per bulan. Jumlah total guru honorer yang dianalisis mencapai 889.442 orang, yang terdiri dari 652.246 guru honorer madrasah⁶⁹ dan 237.196 guru honorer di bawah Kemendikbud;⁷⁰ angka ini menunjukkan besarnya tenaga pendidik non-PNS yang masih bergantung pada skema pendanaan pemerintah, sekaligus menggambarkan skala kebutuhan anggaran yang signifikan jika ingin meningkatkan kesejahteraan mereka secara merata. Dengan demikian, secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{gaji per bulan} &= \text{total anggaran} \div \text{jumlah guru} \div 24 \\ &= \text{Rp93,02 triliun} \div 889.442 \div 24 \\ &= \text{Rp4,35 juta per guru per bulan.} \end{aligned}$$

3.16 Semua Tenaga Kesehatan Berpotensi Menerima Insentif sekitar Rp4,88 Juta Per Bulan Selama Satu Tahun.

Perhitungan ini membagi total anggaran dengan jumlah tenaga kesehatan untuk mendapatkan insentif per orang per tahun, kemudian membaginya lagi dengan 12 bulan untuk memperoleh nilai per bulan. Dengan demikian, secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Insentif per orang per bulan} \\ &= \text{total anggaran} \div \text{jumlah tenaga kesehatan} \div 12, \\ &= \text{Rp93,02 triliun} \div 1,59 \text{ juta}^{71} \\ &= \text{Rp58,5 juta per tahun atau sekitar Rp4,88 juta per bulan.} \end{aligned}$$

⁶⁹ <https://khazanah.republika.co.id/berita/t9vwfg458/riuh-tuntutan-pengangkatan-pppk-kemenag-652246-guru-honorer-madrasah-ditangani-bertahap>

⁷⁰ <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-guru-honorer-yang-tersisa-dirjen-nunuk-ungkap-rencana-seleksi-cpns>

⁷¹ <https://share.google/hp7qGTSOjbvaYsvEc>

3.17 Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya dapat Mendukung Akses Ekonomi bagi Disabilitas sebesar 6,1 Juta

Pada tahun 2026, pemerintah menambah sekitar 33 ribu⁷² penyandang disabilitas baru sebagai penerima bansos, namun angka ini masih sangat kecil dibandingkan dengan kondisi nasional, di mana terdapat sekitar 15,26 juta penyandang disabilitas yang tercatat dan sekitar 8,5 juta di antaranya tergolong miskin. Artinya, cakupan bantuan masih jauh dari total kebutuhan. Di sisi lain, skema bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk disabilitas umumnya hanya memberikan sekitar Rp2,4 juta per tahun per orang,⁷³ yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perluasan, besaran dan jangkauan bantuan masih terbatas dibandingkan dengan skala populasi dan kebutuhan ekonomi kelompok disabilitas di Indonesia. Dengan demikian, secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bantuan per orang per tahun} &= \text{total anggaran} \div \text{jumlah penerima} \\ &= \text{Rp93,02 triliun} \div 15.262.488^{74} \text{ orang} \\ &\approx \text{Rp6,09 juta per orang per tahun} \end{aligned}$$

3.18 Pajak Kekayaan 50 Triliuner Terkaya dapat Menjamin 34 Juta Lansia atas Perlindungan Jaminan Hari Tua

Estimasi menghitung perbandingan total anggaran dengan jumlah penerima untuk mendapatkan bantuan per orang per tahun, kemudian membaginya lagi dengan 12 bulan untuk memperoleh nilai per bulan. Dengan demikian, secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bantuan per orang per bulan} \\ &= \text{total anggaran} \div \text{jumlah lansia (diatas usia 60 tahun)} \div 12, \\ &= \text{Rp93,02 triliun} \div 33,94 \text{ juta}^{75} \\ &= \text{Rp228 ribu per bulan (Rp2,74 juta per tahun)} \end{aligned}$$

⁷² <https://www.asatunews.co.id/bansos-disabilitas-april-2026-cara-daftar>

⁷³ <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/keuangan/pkh-2025>

⁷⁴ <https://pemberdayaan.go.id/pages/media/detailmedia/85-juta-penyandang-disabilitas-miskin-menko-pm-kesempatan-untuk-berdaya-harus-dibuka-seluas-luasnya>

⁷⁵ <https://share.google/emCU6WXTlx2An7KYB>

3.19 Setiap Keluarga dengan Balita Akan Menerima Rp9,13 Juta Per Tahun untuk Layanan Penitipan Anak.

Kalkulasi ini membagi total anggaran dengan jumlah keluarga yang memiliki balita⁷⁶ untuk mendapatkan insentif per keluarga per tahun, kemudian membaginya lagi dengan 12 bulan untuk memperoleh nilai per bulan. Dengan demikian, secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Insentif per keluarga per bulan} &= \text{total anggaran} \div \text{jumlah keluarga} \div 12 \\ &= \text{Rp93,02 triliun} \div 10.183.018 \text{ keluarga} \\ &= \text{Rp761 ribu per bulan (Rp9,13 juta per tahun)} \end{aligned}$$

3.20 10 Rupiah untuk Seluruh Biaya Pengobatan Penyakit Kronis Seperti Cuci Darah

Estimasi dilakukan dengan menghitung biaya per orang per tahun dengan mengalikan biaya bulanan dengan 12 bulan, kemudian mengalikan hasilnya dengan jumlah pasien untuk mendapatkan total kebutuhan tahunan, lalu membandingkannya dengan total anggaran; Dengan demikian, secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total kebutuhan Pengobatan} &= (\text{biaya per bulan} \times 12) \times \text{jumlah pasien}, \\ &= \text{Rp9 juta} \times 12 \times 200.000^{78} \\ &= \text{Rp21,6 triliun per tahun}, \end{aligned}$$

Dengan demikian, potensi pajak kekayaan sebesar Rp93,02 triliun dapat membiayai kebutuhan biaya pengobatan penyakit kronis selama 4 tahun.

⁷⁶ <https://www.kemendukbangga.go.id/posts/722c664b-ea95-4785-a2c8-cbf1f7c4e340-mendukbangga-sampaikan-hasil-pemutakhiran-pendataan-keluarga-2025>

⁷⁷ <https://share.google/C0irYeSBvEf7H2sWH>

⁷⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/09/16471051/menkes-pasien-cuci-darah-di-indonesia-totalnya-ada-200000-an>

REPUBLIK OLIGARKI

KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA 2026



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl. Banyumas, Menteng
Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id